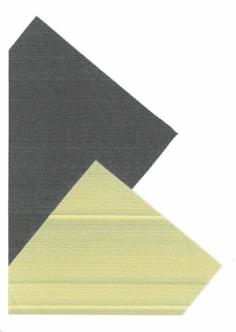


PEMERINTAH DAERAH PURWAKARTA

RENCANA AKSI

2025

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK



lo.	Kodrek	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Satuan	Langkah Aksi	TW 1		TW 2		TW 3	I	TW 4
			manator	Targot		Editighter And	Realisasi	%	Realisasi	% F	Realisasi	% R	Realisasi
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Penyusunan Dokumen Renstra, Renstra peubahan, Renja, Renja Perubahan,Manajemen Resiko, Laporan SPM							
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1		pertemuan pembahasan RKA Perubahan, RKA farsial & Penyusunan dokumen RKA Perubahan							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1		pertemuan pembahasan &Penyusunan dokumen DPA Murni , DPA Parsial							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2		pertemuan pembahasan &Penyusunan dokumen LAKIP							
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3		Pertemuan pembahasan &Penyusunan evaluasi kinerja							
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38		Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN						T	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	•	Hasil Laporan keuangan akhir tahun SKPD							
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1		Pertemuan pembahasan & Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)							
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	Penyusunan laporan rekonsiliasi per triwulan							
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-										

1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	40	Orang		
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan				
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	65	Orang	Pertemuan dan	
	Peraturan Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-			Pembahasan Manajemen	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	Paket	Pengadaan Komponen	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1	Paket	Pengadaan Peralatan	
		Disediakan			Rumah Tangga yang	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Pengadaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1	Paket	Pengadaan Barang Cetakan	
	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan			dan Penggandaan yang	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	Pengadaan jamuan makan dan minum tamu	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Laporan Hasil Perjalanan Dinas biasa dan dalam daerah	
1 06 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	1	Dokumon		
	SKPD	Dinamis pada SKPD		Dokumen	Penyusunan dan Penataan Arsip Dinamis	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	Pengadaan Mebel	
1.06.01.2.07.0006		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	Penyusunan Laporan SPM	
1.06.01.2.07.0010	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	Pengadaan Materai	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Pembayaran Listrik, Internet	
1.06.01.2.08.0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Pembayaran Gaji Pegawai Non ASN, Tunjangan Lapangan dan honorarium pengelola barang dan IT	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

1.0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	Pembayaran pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan			
1.0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	Pembayaran pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan			
1.0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Rehdayasos (SLTR)			
1.0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	Pemeliharaan sarana prasarana kantor ac, komputer dan printer			
1.0		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
1.0		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
1.0	06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Penyediaan sarana dan prasarana makam pahlawan		j	
1.0		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	400	Makam	Renovasi dan perbaikan Makam			

NENENG MARYAMAH, S.ST., M.Kes
NP. 1971040 199302 2 002

N	16 - 1 - 1	Description (C. I.I.)	 	Cohuan Taurat	Langlesh Ales	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
No.	Kodrek	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan Target	Langkah Aksi	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SO											
		Kegiatan : Pengembangan Potens		Sosial Kewenang		ta				Т		T	
1		Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan Kemensos mengenai materi sosialisasi								
2		Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Orang	Koordinasi dengan Kemensos mengenai materi sosialisasi								
3		Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	melakukan koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas dan Komda lansia								
4		Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	melakukan koordinas dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial							E	
		PROGRAM PENANGANAN WARG											
		Kegiatan: Pemulangan Warga Neg	ara Migran Korban Tinda	k Kekerasan Dari	Titik Debarkasi Di I	Daerah Kab	upate	en/Kota Unti	uk Dir	ulangkan k	e Des	sa/Keluraha	an
5		Sub . Kegiatan: Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	berkoordinasi dengan Disnakertran, Dinas Sosial Provinsi, Desa/Kelurahan terkait						3		

	PROGRAM REHABILTASI SOSIAI Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasa	ar Penyandang Disabilitas	Terlantar, Anak	Terlantar, Lanjut Us	ia Terlantar	, serta	Gelandar	gan P	engemis da	n Mas	syarakat	
6	Sub. Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Orang	Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD serta Desa/Kelurahan								
7	Sub. Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan TKSK dan pihak desa/kelurahan								
8	Sub. Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan PSM dan pihak desa/kelurahan								
9	Sub. Kegiatan: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan reunifkasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan								
10	Sub. Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas, Komda lansia, keluarga anak terlantar								
11	Sub. Kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas, Komda lansia, keluarga anak terlantar								

12	Sub. Kegiatan: Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan, Disdukcapil							
13	Sub.Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	Orang	Koordinasi dengan PSM dan pihak desa/kelurahan, bidang terkait							
14	Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kab/Kota	Orang	koordinasi dengan PSM, TKSK, desa/Kelurahan dan Diskominfo							
15	Sub. Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan IPSM untuk meminta usulan tim reaksi cepat							
16	Sub. Kegiatan : Pemberiaan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	Orang	Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan							
17	Rujukan	rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan Panti swasta di Kab. Purwakarta, Dinsos Prov Jabar dan Kemensos RI							
	Kegiatan : Rehabilitasi sosial Pen	yandang Masalah Kesejah	teraan Sosial (PN	/IKS) Lainnya Bukar	n Korban Hl	V/AID	S dan NAI	PZA di	Luar Panti	Sosial	
18	Sub. Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD serta Desa/Kelurahan							

19	Sub. Kegiatan : Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	Koordinasi antar perangkat daerah			ř				
						Cepala Bida	ng Re	ta, 14 Janu Tabilitasi Da Social Apin Mulya 1727 20100	an Pen	nberdayaan	ı

_	T	T	Sas	aran	%		Re	alisas	si dan	Targe	t Kine	rja			I		T
No.	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target	Satuan		TW 1	%	TW 2	%	TW 3	%	TW 4	%	Rencana Aksi	Permasalahan	Tindak Lanjut Rencana Aksi dan Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN																
	Kegiatan: Pengembangan Po	tensi Sumber Kesejahteraar	Sosial Kewer	nangan Daerah	Kab/kota	3											
1	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	192	Orang	100%									Koordinasi dengan Kemensos mengenai materi sosialisasi	Kurangnya pemahaman PSM mengenai Puskesos dan SLRT	melakukan sosialisasi kepada PSM mengenai Peranan PSM dalam pengembangan Puskesos, pendataan PPKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	192 PSM diberikan Sosialisasi Tentang Puskesos dan pendataan PPKS
2	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	17	Orang	100%	ä								Koordinasi dengan Kemensos mengenai materi sosialisasi	Kurangnya pembinaan terhadap TKSK	melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di SLRT- Puskesos	Diberikan sosialisasi tentang peran dan fungsi TKSK dalam Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kecamatan
3	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Keluarga	100%									melakukan koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas dan Komda lansia	Kurangnya perhatian mengenai peringatan hari disabilitas dan Lansia	mengadakan kegiatan peringatan hari lansia serta hari disabilitas	pelaksanaan Peringatan Hari Iansia dan Disabilitas
4	Sub. Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Lembaga	100%									nembaga-tembaga	Belum optimalnya pembinaan terhadap lembaga-lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial	mengadakan bimbingan teknis SLRT- Puskesos, Penguatan Karang Taruna, pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Pelaksanaan sosialisasi tugas dan fungsi SLRT- Puskesos, peningkatan kemampuan Karang Taruna, LKS dan organisasi sosial lainnya
_	PROGRAM PENANGANAN W	ARGA NEGARA MIGRAN	KORBAN TIND	AK KEKERAS	SAN												
	Kegiatan: Pemulangan Warga	Negara Migran Korban Tino	lak Kekerasan	Dari Titik Deba	rkasi Di I	Daerah	Kabup	oaten/k	Kota U	ntuk D	ipulanç	kan K	e Desa	a/Kelurahan Asal			*
5	Sub . Kegiatan: Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	100%									berkoordinasi dengan Disnakertran, Dinas Sosial Provinsi, Desa/Kelurahan terkait	kesulitan informasi menjangkau warga negara migran korban tindak kekerasan	melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi mengenai warga negara migran tersebut	pemulangan warga negara migran korban kekerasan ke kelurahan/desa asal dari titik debarkasi

Г	PROGRAM REHABILTASI SO	OSIAI															
-	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial	Dasar Penyandang Disabilit	as Terlantar, A	nak Terlantar, I	Lanjut Us	sia Terla	antar,	serta (Selanda	angan	Penge	mis da	n Mas	yarakat		•	
(Suh Kediatan : Penyediaan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan kabupaten/kota		Orang	100%									Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD serta Desa/Kelurahan	kesulitan dalam penjangkauan penerima manfaat	Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD, LKSA, Desa/Kelurahan untuk menjangkau penerima manfaat	menyalurkan bantuan permakanan
	, Sub. Kegiatan : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100%									Koordinasi dengan TKSK dan pihak desa/kelurahan	kesulitan dalam menjangkau penerima manfaat	melakukan koordinasi dengan TKSK dan pihak desa/kelurahan untuk menjangkau penerima manfaat	menyalurkan bantuan sandang
8	Sub. Kegiatan : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	55	Orang	100%									Koordinasi dengan PSM dan pihak desa/kelurahan	ketidaklengkapan data pengajuan serta penerima manfaat banyak yang meninggal	melakukan verifikasi dan validasi secara berkala terhadap calon penerima manfaat	menyalurkan alat bantu sesuai hasil verfikasi
6	Sub. Kegiatan: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan reunifkasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	100%									Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan	kesulitan dalam menjangkau penerima manfaat	melakukan reunifikasi penerima manfaat dan keluarga	mereunifikasi penerima manfaat dengan keluarga
1	Sub. Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	100%									koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas, Komda lansia, keluarga anak terlantar	tidak memiliki kapasitas untuk memberikan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	yang memiliki kapasitas dalam	terlaksananya kegiatan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial
1	Sub. Kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang 1 Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	75	Orang	100%									koordinasi dengan Komunitas penyandang disabilitas, Komda lansia, keluarga anak terlantar	kurangnya pemahaman keluarga dalam memberikan edukasi kepada penerima manfaat	yang memiliki kapasitas dalam memberikan pemahaman mengenai	terlaksananya kegiatan pemberian bimbingan sosial
1	Sub. Kegiatan: Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk 2 Kependudukan,Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	100%									Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan, Disdukcapil	kesulitan dalam menjangkau penerima manfaat	melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dalam pengusulan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas anak	terfasilitasinya pengusulan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas anak

Sub.Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	30	Orang	100%									Koordinasi dengan PSM dan pihak desa/kelurahan, bidang terkait	tidak memiliki wewenang dalam mengakses sistem informasi pengajuan penerima manfaat	berkoordinasi dengan bidang terkait dalam pengusulan bantuan pendidikan maupun kesehatan	penerima manfaat mendapatkan akses layanan pendidikan melalui KIP dan akses kesehatan melalui KIS yang dibiayai pemerintah
Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kab/Kota	25	Orang	100%									koordinasi dengan PSM< TKSK, desa/Kelurahan dan Diskominfo	belum memiliki hotline pengaduan	membentuk hotline pengaduan yang terintegrasi dengan SLRT dan Puseksos	terlayaninya pengaduan data dari masyarakat
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	100%									Koordinasi dengan IPSM untuk meminta usulan tim reaksi cepat	belum adanya tim reaksi cepat dalam penanganan kedaruratan	membentuk tim reaksi cepat untuk merespon masalah layanan kedaruratan	merespon secata tepat dan tanggap mengenai layanan kedaruratan
Sub. Kegiatan : Pemberiaan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	30	Orang	100%									Koordinasi dengan PSM, TKSK dan pihak desa/kelurahan	kesulitan dalam menjangkau penerima manfaat	menelusuri keluarga penerima manfaat	penerima manfaat mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga
Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	100%									Koordinasi dengan Panti swasta di Kab. Purwakarta, Dinsos Prov Jabar dan Kemensos RI	tidak adanya panti milik pemerintah Kabupaten Purwakarta	melakukan rujukan penerima manfaat sesuai dengan kategori penerima manfaat	penerima manfaat dirujuk sesuai dengan kategorinya
Kegiatan : Rehabilitasi sosial F	Penyandang Masalah Keseja	ahteraan Sosial	(PMKS) Lainn	ya Bukar	Korba	n HIV	AIDS	dan NA	APZA C	di Luar	Panti S	Sosial				
Sub. Kegiatan: Penyediaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota			100%									Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD serta Desa/Kelurahan	kesulitan dalam penjangkauan penerima manfaat	Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD, LKSA, Desa/Kelurahan untuk menjangkau penerima manfaat	menyalurkan bantuan perbekalan kesehatan
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	30	Dokumen	100%									Koordinasi antar perangkat daerah	belum optimalnya pelaksanaan SLRT dan Puskesos	melakukan sosialisas mengenai SLRT dan Puskesos	terjalinnya kerjasama antar Iembaga dan kemitraan
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberiaan Pelayanan Penelusuran Keluarga Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan Kegiatan: Rehabilitasi sosial F Sub. Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Sub. Kegiatan: Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Penelusuran Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberiaan Pelayanan Penelusuran Keluarga Sub. Kegiatan: Pemberiaan Keluarga Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan Sub. Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan Rehabilitasi Keruntan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Penelusuran Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga Sub. Kegiatan: Pemberiaan Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/Kota Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/Kota Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan: Pemberian Layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan: Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Valuar Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Vahunaten/Kota	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Medaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Penelusuran Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Penelusuran Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Sub. Kegiatan: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Sub. Kegiatan: Pemberian Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Pemberian Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan Rehabilitasi Remitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan Rehabilitasi Remitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Re	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar kewenangan kabupaten/kota	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan Pengaduan Memberian Layanan Kedaruratan kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan Kewenangan Kab/Kota Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan Pemberian Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan: Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korba Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan Rehabilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan Dasar sebantan dasar kewanangan kabupaten/kota sebantan dasar kemangan kabupaten/kota sebantan dasar kemangan kabupaten/kota sebantan dasar kewanangan kabupaten/kota sebantan dasar kemangan kabupaten/kota sebantan di Luar Panti sebantan di Luar Panti kegiatan: Penjasama Antar Lembaga dan kenitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan Rehabilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan Rehabilitasi Pela	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar salah pendidikan dan Kesehatan Dasar salah pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota supaten/kota s	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar aksebatan dasar kewenangan kabupaten/kota	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar akse ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar aksebupaten/kota	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar mendidikan dan Kesehatan Dasar mendidikan dasar kewenangan kabupaten/kota Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan Pengaduan Kewenangan Kabi/Kota Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan Pengaduan Kewenangan Kabi/Kota Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Pendesaran Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan Pengaduan Kewenangan Kabi/Kota Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Penelusuran Pengaduan Pengayanan Penelusuran Pengayanan Penelusuran Pengayanan Pengay	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan Dasar layanan pendidikan dan kesehatan Dasar layanan pendidikan dan kesehatan Dasar kewenangan kabupaten/kota layanan Data Dan Pengaduan layanan Data Dan Pengaduan layanan Data Dan Pengaduan layanan Kewenangan Kab/Kota layanan Kegiatan: Pemberian Layanan Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan kedaruratan kedaruratan kedaruratan kedaruratan layanan Penelusuran kedaruratan kedaruratan kewenangan Kab/Kota layanan Penelusuran Pengaduan layanan Penelusuran kedaruratan penelusuran kelarga kewenangan kabupaten/kota layanan rejukan kewenangan layanan rejukan kewenangan layanan rejukan kewenangan layanan reju	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan Dasar kewanangan kabupaten/kota Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan Pengaduan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Redaruratan Kewanangan Kab/Kota Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Redaruratan Kewanangan Kab/Kota Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Redaruratan Kewanangan Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: Pemberian Pengaduan Pen	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kesehatan Dasar kesehatan Dasar kesehatan Dasar kesehatan Dasar keyanan pendidikan dan Kesehatan Dasar keyanan pendidikan dan Kesehatan dasar kewanangan kabupaten/kota	Sub. Kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikah dan Akses ke Layanan Pendidikah dasar kesehatan dasar kes	Bub Kegiatan: Pemberian Akses ke Lajayana Pendelikan Asakse ke Lajayana Pendelikan Asakse ke Lajayana Pendelikan Asakse ke Lajayana Asabupaten/kota Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Pendelikan Asabupaten/kota Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Pendelikan Asabupaten/kota Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Pendelururan Kedurga Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Pendelururan Kedurga Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Pendelururan Kedurga Sub. Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Rayanan Kedaruratan Rayanan Rayanan Kedaruratan Rayanan Rayanan Kedaruratan Sub. Kegiatan: Pemberian Rayanan Kedaruratan Rayanan

Purwakarta, 14 Januari 2025 Bidang Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Sosial

binato Ibrahim Mulyana, S.Ag

		D	Indikator	Satuan	Target	Langkah Aksi	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
0.	Kodrek	Program/Kegiatan/Subkegiatan	indikator	Satuan	Target	Lalignali Ansi	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1 01	.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												+
1.	06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Yang Dimutakhirkan dan Difasilitasi	Dokumen	1									
1.	06.05.2.02.01	- Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	345000	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan	86250	25	172500	50	258750	75	345000	100
1.	06.05.2.02.02	- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten / kota	Keluarga	102038	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, data non aktif, juga verifikasi ketidaklayakan yang masih kurang update	102038	100	102038	100	102038	100	102038	100
1.	06.05.2.02.03	- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten / kota	Keluarga	27405	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan SDM Fasilitator Bansos, Pihak Bank Himbara dan agen penyalur	27405	100	27405	100	27405	100	27405	10
1.	06.05.2.02.04	- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendaptkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten / kota	Orang	20	Koordinasi dengan lintas sektor, Perangkat Desa / Kelurahan maupun Kecamatan yang terdapat PPKS (WRSE) yang memiliki potensi usaha	20	100	20	100	20	100	20	10
0	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							-			-	-	+
1.	.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Data Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Dokumen	1									

1.06.06.2.01.01	-Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	25	25	50	50	75	75	100	10
1.06.06.2.01.02	-Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	18	25	35	50	53	75	70	10
1.06.06.2.01.03	- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	1	100	1	100	1	100	1	10
1.06.06.2.01.04	- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	8	25	15	50	23	75	30	10
1.06.06.2.01.04	- Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	8	25	15	50	23	75	30	10
1.06.06.2.02	Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana SDM TAGANA dan Lumbung Sosial	Dokumen	1									
1.06.06.2.02.01	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	Koordinasi dengan Lintas Sektor, stakeholder bencana dan TAGANA	1	100	1	100	1	100	1	10
1.06.06.2.02.02	- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	25	100	25	100	25	100	25	10



	1 19 4 - 10 1	Sas	aran	%			Realisasi	i dan	Target Kin	erja			Rencana Aksi	Permasalahan	Tindak Lanjut Rencana Aksi	Keterangar
. Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target	Satuan		TW 1	%	TW 2	%	TW 3	%	TW 4	%	Rendana Aksi	- Cimasaianan	dan Upaya Mengatasi	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (KPM PKH)	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten / kota	27405	кк	100	27405	100	27405	100	27405	100	27405	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan SDM Fasilitator Bansos, Pihak Bank Himbara dan agen penyalur	Kurang berjalannya pemutakhiran data KPM	Kurang berjalannya pemutakhiran data KPM	Berkoordina dengan linta sektor seper pendampin dengan opera SIKS-NG di De / Kelurahan a data dapat termutakhirk
	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	70	ORANG	100	70	100	70	100	70	100	70	100				
Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	345000	ORANG	100	86250	25	172500		258750		345000		Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Koordinasi dengan opera desa / kelurah agar memadanka data dan memverifika data meningi serta non ak
PBI APBN		354.906	ORANG	100	354.906	100	354.906	100	354.906	100	354.906	100	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Koordinasi dengan opera desa / kelural agar memadanka data dan memverifika data meningi serta non ak
PBI APBD		95579	ORANG	100	95579	100	95579	100	95579	100	95579	100	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, kurangnya verifikasi data meninggal dan non aktif	Koordinas dengan opera desa / kelurai agar memadanka data dan memverifika data mening serta non ak
SDM Operator Data Fakir Miskin (17 Kecamatan x 12 Bulan)		17	ORANG	100	17	100	17	100	17	100	17	100				
SDM Operator Data Fakir Miskin (175 Kecamatan x 4 Bulan)		175	ORANG	100	175	100	175	100	175	100	175	100				

0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (PKH + BPNT)	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten / kota	102038	KK (Keluarga)	100	102038	100	102038	100	102038	100	102038	100	Koordinasi dengan lintas sektor seperti Operator Desa / Kelurahan, Pendamping PKH	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, data non aktif, juga verifikasi ketidaklayakan yang masih kurang update	Terdapat beberapa data yang bermasalah seperti data tidak padan, data non aktif, juga verifikasi ketidaklayakan yang masih kurang update	Koordinasi dengan operat desa / kelurah: agar memadankar data dan memverifikas data meningg serta non akt
- 1	SDM Pengelola Data Fakir Miskin (2 orang x 12 Bulan)		2	ORANG	100	2	100	2	100	2	100	2	100				
F	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten / kota	20	ORANG	100	20	100	20	100	20	100	20	100	Koordinasi dengan lintas sektor, Perangkat Desa / Kelurahan maupun Kecamatan yang terdapat PPKS (WRSE) yang memiliki potensi usaha			
- 1	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana															
I	Layanan Kebencanaan								-				_	-			Koordinas
	- Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100	25	25	50	50	75	75	100	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	Gudang logistik yang kurang memadai, Logistik terbatas, lumbung sosial hanya ada di 4 Kecamatan	Gudang logistik yang kurang memadai, Logistik terbatas, lumbung sosial hanya ada di 4 Kecamatan	dengan Din Sosial Provir Jawa Barat d PSKBA
	- Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70	Orang	100	18	25	35	50	53	75	70	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	Gudang logistik yang kurang memadai, Logistik terbatas, lumbung sosial hanya ada di 4 Kecamatan	Gudang logistik yang kurang memadai, Logistik terbatas, lumbung sosial hanya ada di 4 Kecamatan	Koordinas dengan Din Sosial Provin Jawa Barat d PSKBA Kemensos I untuk mint buffer stoc tambahan se lumbung sos tambahan
	- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Unit	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	terjaomya pencana bersifat aksidental (tidak dapat di prediksi) + Terdampak refocusing (pemotongan	Terjadinya bencana bersifat aksidental (tidak dapat di prediksi) + Terdampak refocusing (pemotongan anggaran 10 jt)	Koordinas dengan BPB TAGANA, da pengelola lumbung sos untuk siag bencana

- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	30	Orang	100	8	25	15	50	23	75	30	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	KK yang tidak dilampirkan di surat permohonan	KK yang tidak dilampirkan di surat permohonan	Koordinasi dengan Desa/Keluraha untuk melampirkan k
- Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	100	8	25	15	50	23	75	30	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	KK yang tidak dilampirkan di surat permohonan	KK yang tidak dilampirkan di surat permohonan	Koordinasi dengan Desa/Keluraha untuk melampirkan k
Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		i de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela c		inge a cell			estate da	actor.								
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kampung	100	1	100	1	100	1	100	1	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor, stakeholder bencana dan TAGANA	Untuk membangun KSB diperlukannya SK Bupati dan kesiapan dari masyarakat / kampung / kecamatan untuk mengajukan KSB	Untuk membangun KSB diperlukannya SK Bupati dan kesiapan dari masyarakat / kampung / kecamatan untuk mengajukan KSB	Koordinasi dengan Kecamatan t Rentan Benca terkait Pembentuka Kampung Sia Bencana
SDM Pengelola Lumbung Sosial 3 Orang x 4 Lumbung		12	Orang	100	12	100	12	100	12	100	12	100				
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	100	25	100	25	100	25	100	25	100	Koordinasi dengan Lintas Sektor dan TAGANA	Kurangnya anggota TAGANA di Kabupaten Purwakarta (belum mewakili Kecamatan) minimal 2 personil per kecamatan.	Kurangnya anggota TAGANA di Kabupaten Purwakarta (belum mewakili Kecamatan) minimal 2 personil per kecamatan.	Koordinasi dengan Dina Sosial Provin dan Kemenso direktorat PSKBA untuk p syarat pengajuan personil TAGANA bar

Purwakarta, 14 Januari 2025
Repala Jobas Perlindungan Jaminan Sosial
dan Purkan jada Fakir Miskin,

EKAPPIFIATIN NINGSIH, S.ST., M.KES.

NIC 19550717 200304 2 005

	1	B	l-dilete.	C-4	T	Langkah Ak-!	TW	1	TW 2		TW 3		TW 4	
0.	. Kodrek	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target	Langkah Aksi		1%	Realisasi	1%	Realisasi	%	Realisasi	%
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								7				
1	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Koordinasi dan Konsultasi untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	48.000.000	100	-		-	-
2	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	30	Koordinasi dan Konsultasi untuk Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota		68,21	7,890,000.00	17,53	2,996,000.00	6,66	3,420,000.00	7,60
3	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Orang	30	Koordinasi dan Konsultasi untuk Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota			50,000,000	100				
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota												
4	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Koordinasi dan Konsultasi Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			75,000,000	100				
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
5	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	Koordinasi dan Konsultasi Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota			55,000,000	100				

	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
5	2.08.04.2.01.0003	Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Konsultasi Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota			50,000,000	100		
_	2.08.04.2.03			+-			-		-		+
	2.00.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
7	2.08.04.2.03.0001	Delaksanaan Benyadigan Layanan Komprehensif hagi	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	Koordinasi dan Konsultasi untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	18,563,000	26,52	16,443,000	23,49	34,994,000	76,60
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
3	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Koordinasi dan Konsultasi untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota			37,000,000	82,22	3,000,000	30,40



Purwakarta, 14 Januari 2025 Binang Pemberdayaan Perempuan

ROCHMAWATI., M.Pd. NIP. 19700923 199601 2 001

	lo. Kodrek	T				[TW 1		TW 2		TW 3		TW	1
No.	Kodrek	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target	Langkah Aksi	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisas	i %
1	2.08.03		Tingkat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	100									
1	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupate/Kota	Dokumen	1									
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koodinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupate/Kota	Dokumen		Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	0	0	0	0	0	0		0 0

2	2.08.03.2.02	Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	50									
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	50	Memberikan Layanan kepada Masyarakat bagi	18.000.000	11	0	0	0	0	0	0
						Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara online maupun offline 2. Melaksanakan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak								
3	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1			2.1					-	
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1. Melaksanakan Koordinasi dengan Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Melaksanakan kerjasama dengan pihak- pihak terkait	0	0	0	0	0	0	0	0

ej et

II	2.08.06		Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	100									
4	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	75									
	2.08.06.2.02.0001	Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	75	Melaksanakan rapat mengenai "Kabupaten Layak Anak (KLA)" selama 3 kali pertemuan	0	0	0	0	0	0	0 ()

w r

5	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Orang	100	d d						
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Orang		1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Program Kerja Forum Anak Kabupaten Purwakarta 2. Melaksanakan Kegiatan Workshop Forum Anak Kabupaten Purwakarta	0	0	0	0	0	0 0

Repair Offices Sosial, Pemberdayaan Perempuan Can Perlindungan Anak

Purwakarta, 14 Januari 2025 Kepala Bidang Perlindungan Perempuah dan Anak

Hj. Rd. Heni Hendrayani, S.H., M.M. NIP. 19671108 199302 2 001